

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki 17.504 Menurut koreksi PBB tahun 2008, Indonesia merupakan negara berpantai terpanjang keempat di dunia setelah Amerika Serikat (AS), Kanada dan Rusia. Panjang garis pantai Indonesia tercatat sebesar 95.181 km dan memiliki potensi sumberdaya pesisir dan lautan yang sangat besar. Besarnya potensi sumberdaya kelautan Indonesia tersebut sangat strategis untuk dikembangkan dalam bidang wisata demi membangun perekonomian dan menunjang kesejahteraan masyarakat yang mengacu pada semangat otonomi daerah dan kemandirian masyarakat lokal.

Salah satu dari sumber yang mendapat perhatian di wilayah pesisir adalah ekosistem mangrove. Fungsi hutan mangrove sebagai *spawning ground*, *feeding ground*, dan juga *nursery ground*, selain sebagai tempat penampung sedimen, hutan mangrove merupakan ekosistem dengan tingkat produktivitas yang tinggi dengan berbagai macam fungsi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang penting. Salah satu fungsi sosial hutan mangrove adalah memungkinkannya berfungsi sebagai tujuan wisata.

Mangrove merupakan alat atau tameng daerah pesisir yang juga mempunyai banyak manfaat. Namun yang terjadi dewasa ini semakin membuat kita pesimis akan kemungkinan untuk tetap merasakan manfaatnya di tahun-tahun mendatang. Tekanan yang berlebihan terhadap kawasan hutan mangrove untuk berbagai kepentingan

tanpa mengindahkan kaidah-kaidah pelestarian alam telah mengakibatkan terjadinya penurunan luas hutan mangrove yang cukup drastis.

Sebagian manusia dalam memenuhi keperluan hidupnya dengan mengintervensi ekosistem mangrove. Hal ini dapat dilihat dari adanya alih fungsi lahan (mangrove) menjadi tambak, pemukiman, industri, dan sebagainya maupun penebangan oleh masyarakat untuk berbagai keperluan. Dampak ekologis akibat berkurang dan rusaknya ekosistem mangrove adalah hilangnya berbagai spesies flora dan fauna yang berasosiasi dengan ekosistem mangrove, yang dalam jangka panjang akan mengganggu keseimbangan ekosistem mangrove khususnya dan ekosistem pesisir umumnya, tidak hanya itu, hal yang sangat dikhawatirkan akibat dari berkurang dan rusaknya hutan mangrove adalah akan terjadinya abrasi di daerah pantai akibat dari kurangnya penahan gelombang.

Menurut Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial berdasarkan data tahun 1999, luas hutan mangrove di Indonesia diperkirakan mencapai 8,60 juta hektar dan 5,30 juta hektar di antaranya dalam kondisi rusak. Kerusakan tersebut disebabkan oleh konversi mangrove yang sangat intensif pada tahun 1990-an menjadi pertambakan terutama di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi dalam rangka memacu ekspor komoditas perikanan. (Anonim, 2004).

Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, Sumatera Utara terdapat kawasan hutan bakau (mangrove). Pemerintah saat ini sedang melakukan tahap rehabilitasi karena selama ini hutan mangrove di daerah tersebut sudah rusak dan berkurang dengan luas kerusakan 4.618 hektar. hal ini akibat dirambah dan dijarah, dan ini harus ditata agar hutan mangrove tetap lestari.

Pada saat ini masyarakat telah banyak mendapat kerugian akibat berkurang dan rusaknya hutan mangrove. Misalnya karena berkurang dan rusaknya hutan mangrove menyebabkan kurangnya penahan gelombang yang dapat menyebabkan abrasi di daerah tersebut, karena berkurang dan rusaknya hutan mangrove menyebabkan sedikitnya penghasilan tambak, hal ini disebabkan oleh kurangnya tempat pemijahan bagi biota laut, kemudian sedikitnya penghasilan arang karena hutan mangrove telah banyak mengalami kerusakan dan beralih fungsi menjadi lahan sawit.

Jadi bisa dikatakan Kerusakan mangrove di daerah Pangkalan Susu disebabkan oleh aktivitas masyarakat yang semakin meningkat dan akhirnya mengeksploitasi hutan mangrove secara berlebihan. Seperti masyarakat sengaja maupun tidak sengaja mengambil hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun untuk dijual dan diproduksi dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, membangun permukiman baru di daerah kawasan hutan mangrove seluas ± 40 Ha, banyaknya areal tambak yang kosong seluas ± 100 Ha, dan adanya alih fungsi lahan mangrove ke lahan sawit yang dilakukan masyarakat seluas ± 60 Ha.

Keadaan hutan mangrove yang semakin mengalami kerusakan tidak akan terlepas dari masyarakat yang ada di daerah tersebut, oleh sebab itu sangat diperlukan masyarakat yang memiliki jiwa partisipasi yang tinggi. Namun pada kenyataannya, perkembangan pergaulan dan transformasi kemajuan peradaban masyarakat telah membawa perubahan sikap, kebiasaan dan serta mendorong mereka untuk mengeksploitasi sumber daya alam pantai dan hutan mangrove. Masyarakat

tersebut semakin berantusias untuk merombak hutan-hutan mangrove menjadi tambak ikan, udang, dan berbagai kepentingan lainnya. Dengan adanya aktivitas masyarakat ini akan mengganggu fungsi primer dari hutan mangrove itu sendiri (Anonim,2007).

Sikap masyarakat yang hanya memanfaatkan sumber daya hutan mangrove tanpa memperhatikan kelestariannya dapat merusak ekosistem hutan mangrove. Untuk itu diperlukan upaya-upaya untuk memperbaiki sikap dan meningkatkan pola partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan mangrove agar fungsi ganda (fungsi ekologis dan sosial ekonomi) dari hutan mangrove dapat berjalan dengan baik dan dapat digunakan secara optimal dan lestari (Sianipar, 2001).

Berdasarkan kenyataan di atas, Pemerintah Pangkalan Susu melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Mangrove agar mangrove di daerah tersebut tidak semakin rusak. Pemerintah pangkalan Susu juga melibatkan masyarakat dalam hal merehabilitasi hutan mangrove di daerah tersebut. Dalam hal ini, peneliti mengambil daerah Kelurahan Beras Baras sebagai Daerah Penelitian, sebab kelurahan Beras Basah Salah satu kelurahan yang hutan Mangrovenya mengalami kerusakan.

B. Identifikasi Masalah.

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi masalahnya, yaitu: Adanya kerusakan mangrove akibat manusia yang mengeksploitasi sumber daya alam pantai dan hutan mangrove seperti masyarakat sengaja maupun tidak sengaja mengambil hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun untuk dijual dan diproduksi dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, membangun permukiman baru di daerah kawasan

hutan mangrove, banyaknya areal tambak yang kosong, dan adanya alih fungsi lahan mangrove ke lahan sawit yang dilakukan masyarakat. Hal ini yang mengakibatkan berkurang dan rusaknya jumlah hutan mangrove di Kelurahan Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu. karena Semakin berkurang dan rusaknya hutan mangrove tersebut akhirnya menyebabkan kurangnya penahan gelombang yang dapat menyebabkan abrasi di daerah tersebut. selain itu penghasilan dari tambak juga berkurang karena kurangnya tempat pemijahan bagi biota laut.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah dan identifikasi masalah, Pembatasan masalah yang diambil penulis pada penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan rehabilitasi mangrove di Kelurahan Beras Basah kecamatan pangkalan Susu kabupaten Langkat.
2. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi mangrove di Kelurahan Beras Basah kecamatan Pangkalan Susu kabupaten Langkat.
3. Peran Pemerintah dalam pelaksanaan rehabilitasi mangrove di Kelurahan Beras Basah kecamatan Pangkalan Susu kabupaten Langkat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi mangrove di Kelurahan Beras Basah kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat?

2. Bagaimana Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi hutan mangrove di Kelurahan Beras Basah kecamatan Pangkalan Susu kabupaten Langkat?
3. Bagaimana peran pemerintah dalam pelaksanaan rehabilitasi hutan mangrove di Kelurahan Beras Basah kecamatan Pangkalan Susu kabupaten Langkat?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi Tujuan Penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi mangrove di Kelurahan Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu kabupaten Langkat.
2. Untuk Mengetahui Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi mangrove di Kelurahan Beras Basah Kcamatan Pangkalan Susu Kabupaten langkat.
3. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam pelaksanaan rehabilitasi hutan mangrove di Kelurahan Beras Basah kecamatan Pangkalan Susu kabupaten Langkat.

F. Manfaat Penelitian

1. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan dari para pembaca tentang kegiatan rehabilitasi hutan mangrove.
2. Memberikan masukan kepada pemerintah tentang perlu tidaknya pemerintah mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove.
3. Memberikan masukan kepada pemerintah setempat pentingnya partisipasi masyarakat dalam merehabilitasi hutan mangrove
4. Menambah referensi tentang rehabilitasi hutan mangrove .